

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang besar pertahun. Saat ini jumlah penduduk indonesia menempati nomor tiga terbanyak di dunia setelah china, dan india, dengan jumlah penduduk yang lebih kurang dari 250 juta jiwa. Dalam suatu Negara yang banyak penduduknya maka Negara tersebut memiliki banyak permasalahan yang dihadapi. Mulai dari tingginya angka kejahatan, angka pertumbuhan penduduk, meningkatnya angka kemiskinan serta tingginya angka pengangguran di Indonesia saat ini bukanlah masalah kecil yang bisa diabaikan begitu saja, tetapi merupakan masalah krusial yang perlu mendapat perhatian dan penanganan dengan baik. Pemerintah tentunya sebagai pejabat publik dan lembaga yang berwenang tentu harus mengupayakan hal ini demi terciptanya kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka pemerintah berkewajiban dalam mengurangi angka pengangguran. Dapat dilihat dalam pasal 1 menyatakan:

1. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dan juga pada pasal 39 pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor, diarah untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik diluar maupun didalam hubungan kerja.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan. Angkatan kerja adalah pelaku dalam proses pembangunan. Demi berhasilnya suatu pembangunan diperlukan angkatan kerja yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Disisi lain penciptaan kesempatan kerja adalah tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan, terutama dalam kondisi Indonesia yang mengalami surplus tenaga kerja. Masalah penciptaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu tantangan bagi peran dan kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilakukan selama ini belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga kerja yang terus meningkat, orientasi pembangunan Indonesia selama ini masih lebih menekankan pada pertumbuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi yang bersifat padat modal (*capital intensif*) sehingga belum banyak menyerap angkatan kerja yang ada. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan ketersediaan kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dalam pengelompokan Negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera teratasi maka menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Besarnya pengangguran dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari tingkat pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk semakin meningkat diikuti pula dengan angkatan kerja yang meningkat akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Perkembangan ekonomi serta pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan. Ketidakseimbangan antara perkembangan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja dengan penambahan pencari kerja berdampak terhadap semakin bertambahnya jumlah pengangguran terbuka. Fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok,

© Hak Cipta Tematik UIN Suska Riau
Sate Lajene University of Sitala Syarif Kasim Riau

yaitu fungsi alokasi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat di desentralisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut pengertian desentralisasi, maka desentralisasi di bidang ekonomi pemerintah, adalah penyerahan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi, yang diajukan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional.

Masalah pengangguran di Indonesia saat ini tentunya bukan hanya pada tatanan pusat saja akan tetapi daerah juga mengalami masalah yang krusial terhadap pengelolaan dan penanganan angka pengangguran di daerah. Kota Pekanbaru misalnya yang merupakan sasaran mobilisasi penduduk di luar daerah Provinsi Riau dan luar Provinsi. Ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk alami. Sehingga dengan hal tersebut Kota Pekanbaru setiap tahunnya mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi terutama dari arus mobilisasi penduduk dari luar daerah yang mengakibatkan angka pengangguran di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahun. Dengan hal tersebut tentu perlu penanganan yang serius dari pemerintahan Kota Pekanbaru melalui Dinas Tenaga Kerja. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi di Kota Pekanbaru. Peningkatan jumlah penduduk disamping dari peningkatan jumlah migrasi juga disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangguran adalah orang yang tidak mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Upaya penempatan tenaga kerja di Kota Pekanbaru dapat dilihat dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3/Kpts/DPRD/2002 tentang persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Dengan diterapkannya Tenaga Kerja Lokal, dimana didalamnya terdapat: (1) Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kota Pekanbaru yang secara turun temurun dan dalam waktu tertentu tinggal di Kota Pekanbaru atau memiliki Kartu Keluarga dan atau KTP Kota Pekanbaru. (2) Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. (3) Antar kerja lokal adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili di daerah kerja antar dinas tenaga kerja. (4) Pencari kerja adalah tenaga kerja yang baik menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. (5) Pemberi kerja adalah setiap pihak yang membutuhkan tenaga kerja.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau mempunyai fungsi dan peranan ganda yaitu sebagai ibu kota provinsi, Sekaligus Kota Pekanbaru

merupakan daerah otonomi yang mempunyai Pemerintahan sendiri. Sebagai pusat pemerintahan tentunya mempunyai kegiatan pembangunan dan menjalankan peran pemerintahan dengan berbagai bentuk masalah yang harus dihadapi termasuk dibidang ketenagakerjaan.

Dinas tenaga kerja mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan tugas bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya dinas tenaga kerja berfungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.
- b. Pemberi izin dan pelaksana pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas tenaga kerja Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai pejabat eselon II yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru. Dinas tenaga kerja Kota Pekanbaru, mempunyai visi “Terwujudnya Kualitas Kemandirian dan perlindungan Tenaga Kerja menuju masyarakat” untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Menciptakan Tenaga Kerja yang berketerampilan serta berkualitas dan mandiri dalam menciptakan lapangan kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha dalam hubungan industrial yang harmonis dengan mengoptimalkan sarana hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.
3. Menciptakan perlindungan dan perlakuan yang sama dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
4. Menciptakan masyarakat terutama masyarakat ketenagakerjaan yang sejahtera.

Adapun tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan Dinas Tenaga Kerja dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendukung tugas pelayanan umum.
2. Mewujudkan pengelolaan administrasi umum, keuangan, administrasi dibidang ketenagakerjaan yang efektif efisien yang akuntable.
3. Meningkatkan kedisiplinan aparatur dinas melalui peningkatan kesejahteraan.
4. Meningkatkan jumlah pegawai teknis sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi.
5. Mewujudkan data ketenagakerjaan untuk membuat kebijakan Disnaker.
6. Mewujudkan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis pelaku proses produksi.
7. Meningkatkan kualitas perlindungan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan secara konfesensif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Meningkatkan sumberdaya manusia pencari kerja yang berkualitas melalui pelatihan dan keterampilan serta produktifitas kerja. Meningkatkan kualitas profesionalisme lembaga-lembaga pelatihan swasta.
9. Meningkatkan system informasi melalui mekanisme bursa kerja.
10. Meningkatkan ahli teknologi tepat guna melalui pengguna tenaga kerja asing.

Berdasarkan tujuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru menerapkan Peran dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumberdaya ketenagakerjaan yang menyeluruh serta perencanaan tenaga kerja.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan produktivitas tenaga kerja.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pemberdayaan lembaga latihan swasta.
4. Terwujudnya system informasi pasar kerja dan mekanisme antar kerja .
5. Terwujudnya peningkatan pengawasan dan penempatan tenaga kerja disektor formal dan informal.
6. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha guna peningkatan kesejahteraan pekerja.
7. Terwujudnya sarana hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.
8. Terwujudnya perlindungan ketenagakerjaan melalui system pengawasan ketenagakerjaan.
9. Terwujudnya keikutsertaan pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan administrasi.
10. Terwujudnya kelancaran kerja dengan tersedianya sarana dan prasarana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Dilihat dan segi ekonomi dapat dilihat dampak pengangguran sebagai berikut:

1. Pengangguran secara tidak langsung berkaitan dengan pendapatan nasional. Tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan turunnya produk domestik bruto (PDB), sehingga pendapatan nasional pun akan mengalami penurunan.
2. Pengangguran akan menghambat investasi, karena jumlah tabungan masyarakat ikut menurun.
3. Pengangguran akan menimbulkan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga akan mengakibatkan kelesuan dalam berusaha.

Ditinjau dan segi sosial, pengangguran bisa menimbulkan dampak yang tidak kecil, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perasaan rendah diri.
2. Gangguan keamanan dalam masyarakat, sehingga biaya sosial menjadi meningkat.

Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap perekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu:

1. Dampak Penganguran Terhadap Perekonomian Suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kermakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (*nyata*) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- b. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat pun akan menurun. dengan demikian, pajak yang harus diterima dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunanpun akan terus menurun.

- c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru, dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

2. Dampak Pengangguran Terhadap Individu yang Mengalaminya dan Masyarakat.

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yangalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

- a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian
- b. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan
- c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

Apabila pengangguran dibiarkan tentunya akan berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Bila tingkat pengangguran tinggi akan menyebabkan tingkat kemakmuran rendah, bahkan dapat membahayakan stabilitas negara. Beberapa akibat pengangguran ai antaranya:

1. Terjadinya bahaya kelaparan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tingkat pertumbuhan ekonomi rendah,
3. Pendapatan perkapita masyarakat rendah
4. Angka kriminalitas tinggi.

(Sumber: <http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/dampakpengangguran.html>, Akses Selasa 04 Juni 2016 Pukul 09:34 Wib)

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2013 – 2015 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Jumlah Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase peningkatan dari tahun sebelum (%)
1	2013	964.558 Jiwa	0,59%
2	2014	999.031 Jiwa	3.57 %
3	2015	1.011.467 Jiwa	1.24 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2015

Dari Tabel 1.1 jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun ketahun , dari tahun 2013 jumlah penduduk 964.558 jiwa naik sebanyak 0,59% dan tahun 2014 jumlah penduduk naik 999.031 jiwa atau naik 3.57 % dan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yakni menjadi 1.011.467 jiwa atau naik 1.24 % .

Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya angkatan kerja menjadi penyebab bertambahnya pengangguran di Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, dari data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru angkatan kerja Kota Pekanbaru dari tahun 2013 – 2015 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran
Tahun 2013 - 2015

No	Tahun	Angkatan kerja	Bekerja	Pengangguran	% Pengangguran
1	2013	408.871	389.921	18.950	4.63 %
2	2014	441.678	412.254	29.424	6.66 %
3	2015	449.694	408.331	41.363	9.20 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2015

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat angkatan kerja Kota Pekanbaru dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 semakin meningkat, pada tahun 2013 angkatan kerja sebanyak 408.871 jiwa naik 4.63% tahun 2014 sebanyak 441.678 jiwa atau naik sebanyak 6.66% dan tahun 2015 naik kembali sebanyak 449.694 jiwa atau naik sebanyak 9.20%. Seiring meningkatnya angkatan kerja mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat di Kota Pekanbaru.

Dinas tenaga kerja terus berupaya untuk menekan angka pengangguran dengan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan sasaran pencari kerja dengan adanya jurang pemisah antara penyedia kerja, mendorong pemerintah untuk menyediakan jembatan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah penyampaian informasi mengenai lapangan pekerjaan kepada pencari kerja salah satunya melalui program ketenagakerjaan. Dengan adanya program ketenagakerjaan penyampaian informasi mengenai kesempatan kerja semakin mudah diperoleh dan semakin memudahkan pencari kerja untuk mengirim lamaran pekerjaan.

Kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Pekanbaru merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat daerah secara terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan kapasitas daerah dan manfaat ilmu pengetahuan pada tahun 2015, jumlah pencari kerja terdaftar pada program ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebanyak 7.022 orang. Sementara itu jumlah penaga kerja yang berhasil ditempatkan sebanyak 1.500 orang dari jumlah pencari kerja. Hal ini dimungkinkan terjadi karena tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja. Terlebih lagi jumlah pencari kerja dari tahun 2012 – 2015 terus bertambah dan dari pencari kerja yang berhasil di tempatkan tidak lebih dari 40 % dari pencari kerja dengan demikian jumlah pengangguran akan semakin besar. Berikut data pencari kerja dan penempatannya dari tahun 2012 – 2015.

Tabel 1.4
Data Pencari Kerja yang Terdaftar Tahun 2012 - 2015

No	Tahun	Jumlan Pencari Kerja yang Tedaftar	Jumlah Pencari Kerja yang di Tempatkan	%pencari kerja yang belum ditempatkan
1	2012	8.567 orang	5.338 orang	37,69 %

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	2013	24.689 orang	9.046 orang	63,36 %
3	2014	12.023 orang	1.782 orang	85,17%
4	2015	7.022orang	1.500 orang	78,63%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 2015

Dari table 1.4 dapat dilihat jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dari tahun 2012 -2015, jumlah pencari kerja ini diambil dari data pencari kerja yang membuat Kartu Angkatan Kerja atau Kartu Kuning (AK1) di Dinas tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pencari kerja terbanyak pada tahun 2013 yaitu 24.689 orang dan yang bisa ditempatkan hanya sebanyak 9.046 orang atau sekitar 63,36 % dari jumlah pencari kerja. Sisa pencari kerja yang masih belum ditempatkan sebanyak 15.643 orang atau 63,36 %. Pada tahun 2012 pencari kerja yang mendaftar ke pencari kerja sebanyak 8.567 orang dan yang bisa ditempatkan hanya sebanyak 5.338 orang orang atau sebanyak 37.69 % dari pencari kerja yang terdaftar, pada tahun 2014 yang terdaftar sebanyak 12.023 orang dan yang bisa di tempatkan hanya sebanyak 1.782 orang atau 85,17%. dan pada tahun 2015 yang terdaftar sebanyak 7.022 orang dan yang telah ditempatkan sebanyak 1.500 orang atau 78,63% dari pencari kerja yang terdaftar.

Adapun upaya-upaya Pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Angka Pengangguran pernah dilakukan, namun belum berjalan secara efektif, Dari fenomena yang telah diuraikan maka terdapat beberapa permasalahan pengangguran yang terdapat di Kota Pekanbaru yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan
2. Tidak memiliki keterampilan , keahlian dan skill
3. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan pangsa pasar

dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Pekanbaru, yang saya beri judul: **PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU DALAM MENGURANGI ANGKA PENGAGGURAN DI KOTA PEKANBARU**

1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor – faktor penghambat Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam mengurangi Angka Pengangguran di Kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan penelitian

- a. Hasil penilaian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan dalam memperkecil angka pengangguran di Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan penelitian dalam hal yang sama.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penerapan tanggung jawab sosial secara efektif bagi instansi-instansi di Indonesia.

2. Bagi Universitas

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan refrensi bagi pihak-pihak lain dalam meneliti masalah selanjutnya di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh untuk dilaksanakan di lapangan.

1.5 Fokus penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas maka dibuatlah batasan-batasan ataupun fokus penelitian yang ada dalam permasalahan ini. Adapun penelitian ini akan difokuskan kepada mengetahui sejauh mana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam mengurangi angka pengangguran, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Tenaga Kerja

dalam mengurangi angka pengangguran, serta mengetahui apa saja solusi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi jumlah pengangguran.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan pada penelitian ini, penulis membagi penelitian ini dalam enam BAB, dimana setiap BAB terdiri dari beberapa sub BAB, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi data, karakteristik objek penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum tentang Kota Pekanbaru, visi dan misi Kota Pekanbaru, menjelaskan tentang Dinas tenaga Kerja dan pembentukannya, struktur organisasi dan aktivitas kantor, hasil penelitian, dan diakhiri dengan pembahasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisa data pada Bab IV untuk selanjutnya memberikan interpretasinya.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan yang mungkin berguna bagi instansi.

